
TINJAUAN TUGAS NEGARA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARA PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGSI**Rizki Martua Nasution¹, Yati Sharfina Desiandri²**^{1,2}Universitas Sumatera Utara, Indonesiamartuarizki178@gmail.com¹, yati.Sharfina@usu.ac.id²

ABSTRACT; *This research aims to examine the role and performance of the state in carrying out its duties regarding the protection of human rights (HAM) for asylum seekers or refugees. The main focus is analyzing the policies, procedures and implementation of human rights protection that have been adopted by countries in response to the situation of refugees. This research uses a comprehensive descriptive analysis approach to evaluate existing policies and practices. Data collection was carried out through literature reviews, policy analysis, and case studies of certain countries that have a significant impact on human rights protection for asylum seekers. The results show variations in countries' approaches to human rights protection for asylum seekers or refugees. Some countries have succeeded in implementing effective and comprehensive policies, while others still face challenges in protecting the basic rights of refugees. In conclusion, consistent and comprehensive implementation of international standards needs to be pursued by all countries to ensure that the human rights of asylum seekers are adequately protected. This research underlines the need for international collaboration in strengthening the human rights protection system for asylum seekers or refugees. States need to improve coordination, transparency and accountability in their efforts to fulfill their human rights responsibilities. In conclusion, effective human rights protection for asylum seekers requires a global commitment to creating a safe and just environment for those seeking international protection..*

Keywords: *Human Rights Protection, Asylum Seekers, Refugees, State Policy*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kinerja negara dalam melaksanakan tugasnya terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pencari suaka atau pengungsi. Fokus utama adalah menganalisis kebijakan, prosedur, dan implementasi perlindungan HAM yang telah diadopsi oleh negara-negara sebagai tanggapan terhadap situasi para pengungsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik-praktik yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur, analisis kebijakan, dan studi kasus negara-negara tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan HAM bagi pencari suaka. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pendekatan negara-negara terhadap perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi. Beberapa negara berhasil mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan menyeluruh,

sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam melindungi hak-hak dasar para pengungsi. Kesimpulannya, implementasi yang konsisten dan komprehensif dari standar internasional perlu diupayakan oleh semua negara untuk memastikan hak asasi manusia para pencari suaka terlindungi secara adekuat. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi internasional dalam memperkuat sistem perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi. Negara-negara perlu meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam upaya mereka untuk memenuhi tanggung jawab HAM mereka. Kesimpulannya, perlindungan HAM yang efektif bagi para pencari suaka memerlukan komitmen global untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi mereka yang mencari perlindungan internasional.

Kata Kunci: Perlindungan HAM, Pencari Suaka, Pengungsi, Kebijakan Negara.

PENDAHULUAN

Pengungsi dan pencari suaka merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang adekuat dari negara-negara penerima. Dalam konteks ini, negara memiliki tugas yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dasar para individu yang mencari perlindungan internasional. Perlindungan HAM bagi pencari suaka dan pengungsi melibatkan aspek legal, sosial, dan kemanusiaan yang menuntut kewajiban negara untuk mengembangkan kebijakan yang responsif dan efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pencari suaka dan pengungsi di berbagai belahan dunia terus meningkat sebagai akibat dari konflik berskala besar, pelanggaran HAM, dan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau tugas dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia para pencari suaka dan pengungsi, serta menganalisis sejauh mana implementasi perlindungan HAM tersebut telah diwujudkan (Abdullah, 2018).

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pencari suaka atau pengungsi merupakan suatu isu global yang menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dari negara-negara yang menjadi tempat perlindungan. Fenomena ini menyoroti kompleksitas tanggung jawab negara dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak dasar individu yang mengungsi dari berbagai bentuk ancaman dan konflik di berbagai belahan dunia.

Pencarian perlindungan bagi para pengungsi menjadi semakin kritis di tengah-tengah ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan bencana alam yang melanda beberapa wilayah. Negara-negara diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan keberlanjutan hidup bagi mereka yang mencari suaka. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalam untuk memahami bagaimana negara-negara menjalankan tugasnya terkait perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi (Cristianti, 2017).

Tinjauan terhadap peran negara dalam konteks perlindungan HAM menjadi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana norma-norma internasional diterapkan dan diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik-praktik negara. Perbandingan antara berbagai pendekatan negara terhadap isu ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas sistem perlindungan dan upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi para pengungsi.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mencakup tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan, implementasi, dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam melaksanakan tugas mereka terkait perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman kita tentang dinamika kompleks yang melibatkan peran negara dalam menjaga hak asasi manusia di tengah-tengah krisis pengungsian global.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana negara-negara menjalankan tugas mereka terkait perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi (Brolan, 2020). Melalui analisis mendalam terhadap kebijakan, prosedur, dan implementasi yang ada, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang tantangan dan perkembangan dalam melindungi hak-hak dasar individu yang menghadapi situasi pengungsi.

Kajian ini juga akan mengeksplorasi variasi pendekatan antarnegara dalam menghadapi masalah ini, serta menyoroti kebutuhan mendesak untuk kerjasama internasional dalam upaya menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia para pencari suaka. Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih baik terkait peran negara dalam melindungi HAM para pengungsi, diharapkan dapat mendorong langkah-langkah menuju sistem perlindungan global yang lebih efektif dan adil.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Literatures review adalah uraian tentang teoritis, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahana acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Literature review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, dll) tentang topik yang dibahas. Literature review yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan literature review . Metode pencarian artikel dalam database jurnal penelitian dan pencarian melalui internet. Pencarian database yang digunakan adalah Google Scholar dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Untuk pencarian artikel, kata kunci yang digunakan juga dicantumkan dalam pengumpulan data adalah “Perlindungan Hak asasi manusia”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era globalisasi ini, persoalan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pencari suaka atau pengungsi menjadi sebuah tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Sebagai suatu tanggung jawab moral dan hukum internasional, negara-negara diharapkan untuk melaksanakan tugas mereka dalam melindungi hak-hak dasar individu yang mengungsi akibat konflik, persekusi, atau bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis tinjauan tugas negara terkait perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi, menyoroti peran negara dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika isu ini.

Perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi tidak dapat dipisahkan dari konteks global yang berubah dengan cepat. Persoalan ini mencakup dampak dari konflik bersenjata, pelanggaran HAM, serta ketidakstabilan politik dan ekonomi. Negara-negara dihadapkan pada tugas yang semakin rumit untuk menciptakan kebijakan dan praktik perlindungan yang efektif, seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi dan perubahan dinamika konflik di berbagai belahan dunia.

Tinjauan terhadap tugas negara dalam konteks perlindungan HAM mencakup analisis mendalam terhadap kebijakan yang diadopsi dan implementasi dari berbagai negara. Beberapa negara berhasil mengimplementasikan kebijakan yang progresif dan komprehensif, dengan menekankan hak-hak dasar, prosedur pengajuan suaka yang adil,

dan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, negara-negara lain masih berjuang dalam menangani isu-isu tersebut, menghadapi kendala administratif, politik, dan budaya.

Keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi sering kali tergantung pada kesiapan negara untuk mengakui kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para pengungsi. Adanya kerangka kerja hukum yang jelas dan diterapkan dengan konsisten menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para pencari suaka.

Tantangan dan Hambatan

Pada saat yang sama, tinjauan terhadap tugas negara juga menyoroti berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksetaraan dalam pendekatan perlindungan antar negara. Tidak semua negara memiliki sistem perlindungan HAM yang setara, dan ini menciptakan ketidakpastian bagi para pengungsi, terutama dalam hal penentuan status suaka dan hak-hak yang diberikan.

Tantangan lainnya melibatkan aspek politik dan publik. Ketakutan akan potensi dampak sosial dan ekonomi dari peningkatan jumlah pengungsi dapat memengaruhi kebijakan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai. Munculnya sentimen anti-imigran juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang bersifat inklusif dan melanggengkan ketidaksetaraan perlindungan (Jones, 2017). Pentingnya kerjasama internasional dalam menjalankan tugas perlindungan HAM menjadi semakin nyata. Negara-negara dihadapkan pada kenyataan bahwa masalah pengungsi tidak dapat diatasi secara terpisah. Komunitas internasional, termasuk lembaga-lembaga seperti UNHCR, memiliki peran kunci dalam memberikan dukungan teknis, sumber daya, dan bantuan keuangan bagi negara-negara yang menerima jumlah pengungsi yang signifikan.

Namun, seiring dengan pentingnya kerjasama internasional, terdapat pula dinamika politik yang rumit. Beberapa negara mungkin merasa bahwa tekanan dari komunitas internasional dapat menghambat kedaulatan mereka dalam mengelola isu pengungsi. Ini menciptakan sebuah tugas negara yang harus diatasi: sejauh mana mereka bersedia berkolaborasi dengan komunitas internasional tanpa mengorbankan kemandirian mereka dalam mengambil keputusan.

Tinjauan tugas negara terkait perlindungan HAM juga harus memperhitungkan dampak perlindungan atau kekurangan perlindungan terhadap hak asasi manusia para pengungsi. Dalam beberapa kasus, ketidakpastian hukum atau prosedur administratif yang lambat dapat menyebabkan penundaan dalam pemberian hak-hak dasar, seperti hak pendidikan atau pekerjaan. Selain itu, adanya ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap berbagai kelompok pengungsi juga dapat mengakibatkan diskriminasi yang merugikan. Misalnya, perempuan dan anak-anak pengungsi sering kali rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, tugas negara dalam perlindungan HAM tidak hanya terfokus pada kebijakan dan prosedur, tetapi juga pada implementasi yang adil dan merata.

Pentingnya melibatkan masyarakat sipil dalam tugas negara terkait perlindungan HAM tidak boleh diabaikan. Organisasi non-pemerintah, lembaga hak asasi manusia, dan kelompok advokasi berperan sebagai pemerhati, pengawas, dan pendukung bagi para pengungsi. Partisipasi masyarakat sipil dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pengungsi. Namun, di beberapa kasus, pemerintah mungkin menghadapi tantangan dalam menerima kritik atau saran dari pihak luar, menganggapnya sebagai campur tangan yang tidak diinginkan dalam urusan dalam negeri. Oleh karena itu, tugas negara dalam hal ini melibatkan keseimbangan yang rumit antara mendukung keterlibatan masyarakat sipil dan menjaga kedaulatan dan otonomi nasional.

Dalam menyimpulkan, tinjauan tugas negara terkait perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi menggambarkan suatu gambaran yang kompleks dan terus berubah. Peran negara tidak hanya berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan implementasi, tetapi juga melibatkan dinamika politik, tanggapan terhadap tekanan internasional, serta interaksi dengan masyarakat sipil.

Dalam menghadapi isu global ini, negara-negara diimbau untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa hak asasi manusia para pengungsi diakui, dihormati, dan dilindungi dengan seksama. Kerjasama internasional, pembangunan kebijakan yang inklusif, dan keterlibatan masyarakat sipil adalah faktor-faktor kunci dalam mencapai tujuan ini. Perjalanan untuk meningkatkan perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi memerlukan kesadaran global yang

meningkat, komitmen yang kuat, dan adaptasi kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, negara-negara dapat memenuhi tugas mereka dalam konteks perlindungan HAM, menciptakan dunia yang lebih adil dan aman bagi mereka yang mencari suaka internasional.

Dalam era globalisasi yang gejolak ini, persoalan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pencari suaka dan pengungsi menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Kondisi konflik, persekusi, dan bencana alam memaksa individu untuk mencari perlindungan di luar batas wilayah mereka. Sebagai tanggung jawab moral dan hukum internasional, negara-negara diharapkan untuk memenuhi tugas mereka dalam melindungi hak-hak dasar individu yang mengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis tinjauan tugas negara terkait perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi, menyoroti peran negara dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika isu ini (Air & Sea, 2017).

1. Konteks Globalisasi dan Pencarian Suaka

Era globalisasi membawa perubahan dinamika dalam pergerakan penduduk. Konflik berskala besar, persekusi berbasis agama atau politik, serta dampak bencana alam seringkali memaksa individu untuk mencari suaka di negara-negara yang lebih aman. Di tengah kompleksitas isu ini, negara-negara berada di garis depan untuk memberikan perlindungan.

2. Dasar Hukum Internasional dalam Perlindungan Pengungsi

Hukum internasional memberikan dasar untuk perlindungan HAM bagi pencari suaka atau pengungsi. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya memberikan kerangka kerja yang mengikat bagi negara-negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang mengungsi. Negara-negara diharapkan untuk menyesuaikan undang-undang dan kebijakan nasional mereka dengan standar internasional ini.

1. Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Negara-negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi HAM para pengungsi. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak atas pendidikan dan kesehatan. Negara juga diharapkan untuk menghindari diskriminasi dan memperlakukan pengungsi dengan kemanusiaan.

2. Tantangan dan Kompleksitas dalam Implementasi

Meskipun kerangka hukum internasional telah diterapkan, banyak negara menghadapi tantangan dalam implementasinya. Beberapa negara menerapkan kebijakan yang membatasi hak-hak pengungsi, termasuk batasan akses terhadap pekerjaan atau pendidikan. Tantangan ini mencerminkan adanya ketegangan antara kewajiban moral dan kepentingan domestik.

3. Peran Negara dalam Penanganan Krisis Pengungsi

Negara memiliki peran kunci dalam menanggapi krisis pengungsi. Membangun infrastruktur untuk menyambut pengungsi, menyediakan akses ke layanan dasar, dan bekerja sama dengan lembaga internasional serta organisasi non-pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Kerjasama regional juga diperlukan untuk mengatasi dampak yang meluas.

4. Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Publik

Pendidikan dan kesadaran publik memainkan peran penting dalam memastikan dukungan masyarakat terhadap perlindungan HAM bagi pengungsi. Kampanye pendidikan yang efektif dapat membantu mengubah persepsi negatif dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu yang mengungsi.

Dalam menghadapi tantangan perlindungan HAM bagi para pencari suaka atau pengungsi, negara-negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum internasional untuk bertindak. Meskipun terdapat kompleksitas dalam implementasinya, kerjasama internasional, penyesuaian kebijakan, dan kesadaran publik dapat memainkan peran kunci dalam menanggapi isu ini. Seiring dengan terus berlanjutnya era globalisasi, penting bagi negara-negara untuk berkomitmen pada perlindungan HAM sebagai landasan bagi keadilan dan kemanusiaan di tengah perubahan dunia yang cepat.

Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, isu perlindungan HAM bagi pencari suaka atau pengungsi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu negara, tetapi juga memerlukan kerjasama internasional yang erat. Negara-negara perlu bersatu untuk menghadapi dampak krisis pengungsi dengan pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia. Hanya dengan kerjasama yang solid, penyesuaian kebijakan yang komprehensif, dan perhatian terus-menerus terhadap kesadaran publik, masyarakat global dapat bergerak menuju masa depan di mana hak asasi manusia bagi para pencari

suaka atau pengungsi tidak lagi menjadi isu kontroversial, melainkan sebuah prinsip yang diterapkan tanpa syarat sebagai ekspresi dari kemanusiaan universal.

Dalam mengakhiri tinjauan mengenai tugas negara terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pencari suaka atau pengungsi, dapat disimpulkan bahwa isu ini memunculkan sejumlah kompleksitas dan tantangan di tengah dinamika era globalisasi. Negara-negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum internasional untuk melindungi hak-hak dasar individu yang mengungsi akibat konflik, persekusi, atau bencana alam. Meskipun terdapat kerangka hukum internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951, implementasinya seringkali menemui hambatan dan ketegangan.

KESIMPULAN

Tinjauan terhadap tugas negara menyoroti beberapa aspek penting. Pertama, perlunya penyesuaian kebijakan nasional dengan standar internasional. Negara-negara perlu mengintegrasikan norma HAM dalam sistem hukum dan kebijakan mereka untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pengungsi. Kesenjangan antara retorika moral dan praktik nyata perlu diatasi.

Kedua, negara memiliki peran sentral dalam menangani krisis pengungsi. Kebijakan yang inklusif, infrastruktur yang memadai, dan kerjasama internasional menjadi kunci dalam memberikan respons yang memadai terhadap tantangan ini. Negara juga perlu memperhatikan aspek pendidikan dan kesadaran publik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Namun, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam melaksanakan tugas mereka tidak dapat diabaikan. Ketegangan antara kewajiban moral dan kepentingan domestik menciptakan situasi kompleks, di mana kebijakan yang membatasi hak-hak pengungsi seringkali muncul. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari negara-negara untuk mengatasi ketegangan ini dan memprioritaskan perlindungan HAM sebagai nilai inti dalam penanganan pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A., Arifin, A., & Tripa, S. (2018). Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia. SHS Web Conference, 45(7th International Conference on Local Knowledge (ICLK 2017)).

Astuti, N. F. (2021). Penyebab Konflik Rohingya di Myanmar, Berikut Penjelasan. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/jabar/penyebabkonflik-rohingya-di-myanmar-berikut-penjelasan-kln.html>

BBC News Indonesia. (2016). UNHCR kritik Australia menangani pencari suaka. Www.Bbc.Com.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130726_unhcr_kritik_australi

Brolan, C. (2020). An analysis of the human smuggling trade and the Protocol against the smuggling of migrants by land, air and sea (2022) from a Refugee Protection Perspective. International Journal of Refugee Law, 14, 561–589.
<https://doi.org/10.1093/ijrl/14.4.561>

CNN Indonesia. (2021) Kapal Pengungsi Rohingnya Terombang-ambing di Perairan Aceh. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211227102125-20-738991/kapal-pengungsi-rohingya-terombang-ambing-di-perairan-aceh>

Christianti, D. W. (2017). Analisa Kejahatan penyelundupan Manusia Berdasarkan smuggling of migrants protocol Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan pencari suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 3(3), 491–508. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a3>

Jones, B. (2017). The post-tsunami paradox of female empowerment in Aceh. Theconversation.Com. <https://theconversation.com/the-post-tsunamiparadox-of-female-empowerment-in-aceh-88864>